

Perencanaan Pembangunan Ekowisata Dan Desa Wisata

Iwan Nugroho¹
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

I. Latar Belakang

Dalam UU 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan daerah. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Pembangunan kepariwisataan memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi wilayah. Jasa pariwisata berperan mempercepat proses transformasi ekonomi termasuk di wilayah perdesaan. Petani secara bertahap dapat belajar mengembangkan jasa-jasa lingkungan dan sosial di wilayahnya masing-masing. Momentum tradisi, budaya dan eksotisme lingkungan dapat dikemas sebagai produk wisata desa yang menarik bagi pengunjung dari luar wilayah. Konsep pembangunan wisata berbasis budaya atau lingkungan di desa, akan bersinergi dengan pembangunan pertanian dan memberikan alternatif kesejahteraan bagi petani. Usaha wisata terbukti menunjukkan kelayakan ekonomi lebih tinggi dibanding usaha tani (Purnomowati, Nugroho dan Negara, 2012). Konsep ini telah menjadi program andalan di sejumlah negara, misalnya Malaysia (Liu, 2006; Kumar, Gill dan Kunasekaran, 2012) dan Thailand (Saraihong and Chanchaoenchai, 2011).

Peluang mengembangkan wisata di desa, atau pengembangan desa wisata sangat terbuka lebar. Menurut Parks et al. (2009), kelompok masyarakat ekonomi kelas menengah memiliki permintaan yang tinggi terhadap perjalanan dan wisata. Seiring dengan itu, peningkatan sarana infrastruktur, khususnya transportasi, memungkinkan akses ke berbagai wilayah tujuan wisata. Melihat potensi ekonomi ini, wilayah perdesaan perlu berbenah menyiapkan diri untuk menerima kehadiran wisatawan dari luar wilayah atau kota-kota lain. Sudah banyak pemerintah daerah mengoptimalkan pengembangan jasa wisata perdesaan, dan memperoleh manfaat kesejahteraan bagi warganya (Nugroho, 2010)

Mengembangkan suatu tujuan wilayah wisata, desa wisata atau ekowisata memerlukan perencanaan yang cermat dan terintegrasi. Kehidupan desa boleh saja maju secara ekonomi, serta menunjukkan kemajuan pembangunan desa. Namun, desa harus tetap menunjukkan peran dan fungsi sebagai sumber inspirasi bagi konservasi lingkungan dan budaya, dan mendukung keseimbangan kehidupan dan ekosistem. Melalui aktivitas wisata, desa dapat memberikan tempat pembelajaran banyak hal khususnya tentang konservasi lingkungan dan budaya (Nugroho dan Negara, 2015).

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep ekowisata dan perencanaan pembangunan ekowisata dan desa wisata.

II. Ekowisata dan Desa Wisata

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Nugroho, 2011)

Sebagai suatu usaha ekonomi, efektivitas operasional jasa ekowisata sangat efisien dan ramping. Karakteristiknya adalah jumlah rombongan pengunjung rendah (low volume), pelayanan berkualitas (high quality) dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi (high value added). Konsumen ekowisata adalah mereka yang menginginkan liburan dengan sensasi alam dan interaksi budaya. Mereka bersedia meluangkan waktu, tenaga dan biaya untuk memuaskan keinginannya. Karenanya, pengelola jasa ekowisata perlu menyediakan akomodasi dan sajian wisata yang baik, aman dan memuaskan. Kedisiplinan dan standar pelayanan tersebut juga bagian dari upaya-upaya melindungi ekosistem jasa ekowisata (Coles, 2006).

1. Iwan Nugroho is a professor in Agribusiness at University of Widyagama Malang. Email iwanuwg@widyagama.ac.id, Blog <http://widyagama.ac.id/iwan-nugroho>.

Kehidupan desa bukan saja memberikan pengalaman yang berbeda dengan kota, tetapi dipandang sebagai upaya menciptakan keseimbangan kehidupan. Pembangunan ekonomi desa berperan dalam pengembangan nilai kemanusiaan dan lingkungan. Desa dapat memberikan tempat yang memberikan kepuasan atau refreshing, serta pembelajaran banyak hal khususnya tentang konservasi lingkungan dan budaya (Nugroho et al., 2016).

Permintaan terhadap layanan desa wisata, atau berbagai obyek dan kehidupan desa sangatlah tinggi. Wisatawan sangat serius melakukan perjalanan wisata menuju desa atau daerah-daerah yang terpencil. Wisatawan domestik dan asing bersedia membayar dengan harga pantas, melakukan perjalanan jauh, untuk mau hadir di desa terpencil seperti Ngadas atau Ngadisari (Bromo), Candirejo (Magelang), Rajegwesi (Banyuwangi), Wanci (Wakatobi), Komodo (Nusa Tenggara Barat), TN Baluran, Raja Ampat (Papua) atau tempat eksotik lain di penjuru Nusantara.

III. Wilayah Tujuan Ekowisata

Konsep dan implementasi ekowisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kawasan konservasi (protected area). Di Indonesia, kawasan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan Taman Buru. KSA terdiri yakni cagar alam dan suaka margasatwa; KPA terdiri dari taman nasional, taman wisata alam serta taman hutan raya. Penetapan kawasan konservasi dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan, dan telah mencapai 414 situs atau luasan 23.1 juta hektar, terdiri 18.4 juta hektar daratan dan 4.7 juta hektar pesisir dan laut (USAID Indonesia, 2004)

Proporsi terbesar dari kawasan konservasi adalah Taman Nasional, yakni 65 persen. Hingga saat ini, Menteri Kehutanan telah menetapkan 50 taman nasional (Tabel 1). Taman Nasional ditetapkan mencakup substansi alasan, posisi, luasan, jenis flora dan fauna endemik atau langka dan job deskripsi pelaksanaan pengembangan. Oleh sebab itu, kelembagaan TN dianggap sebagai komponen penting dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam skala nasional maupun internasional (Rothberg, 1999).

Tabel 1. Kawasan Taman Nasional di Indonesia

Jawa	1. Karimunjawa	5. Gunung Gede Pangrango ^a	9. Alas Purwo
	2. Bromo Tengger Semeru	6. Gunung Halimun	10. Gunung Merapi
	3. Meru Betiri	7. Kep Seribu	11. Gunung Merbabu
	4. Baluran	8. Ujung Kulon ^b	12. Gunung Ciremai
Sumatera	1. Gunung Leuser ^{a b}	5. Bukit Duabelas	9. Way Kambas
	2. Siberut ^a	6. Berbak ^c	10. Batang Gadis
	3. Kerinci Seblat ^b	7. Sembilang	11. Tesso Nilo
	4. Bukit Tigapuluh	8. Bukit Barisan Selatan ^b	
Kalimantan	1. Gunung Palung	4. Bukit Baka-Bukit Raya	7. Kayan Mentarang
	2. Danau Sentarum ^c	5. Tanjung Puting ^a	8. Sebangau
	3. Betung Kerihun	6. Kutai	
Sulawesi	1. Bunaken	4. Taka Bonerate	7. Kepulauan Togean
	2. Bogani Nani Wartabone	5. Rawa Aopa Watumohai	8. Bantimurung - Bulusaraung
	3. Lore Lindu ^a	6. Wakatobi	
Bali dan Nusa Tenggara	1. Bali Barat	3. Komodo ^{a b}	5. Laiwangi Wanggameti
	2. Gunung Rinjani	4. Manupeu Tanah Daru	6. Kelimutu
Maluku dan Papua	1. Manusela	3. Teluk Cendrawasih	5. Wasur
	2. Aketajawe - Lolobata	4. Lorentz ^b	

Keterangan: ^a Cagar Biosfer, ^b World Heritage Sites, ^c Ramsar Sites

Sumber: Departemen Kehutanan (2006) [http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_index.htm]

Pengembangan jasa ekowisata dalam tingkat pengelolaan oleh Taman nasional di Indonesia telah berkembang. Struktur dan fungsi taman nasional memperlihatkan kompetensi mendukung pengembangan ekowisata. Taman nasional juga ikut berperan menginisiasi, mendampingi atau memfasilitasi pengembangan ekowisata di desa-desa sekitar wilayah Taman Nasional.

Aktivitas jasa ekowisata di luar wilayah taman nasional juga berkembang. Wilayah tujuan ekowisata tersebut biasanya memiliki kearifan, pengalaman dan nilai-nilai budaya yang menyatu dengan lingkungan untuk mendukung kehidupan ekonomi. Wilayah tujuan ekowisata itu dapat menjadi bagian dari ekosistem pesisir, lautan, atau daratan; di sekitar kawasan konservasi, desa atau wilayah yang memiliki nilai-nilai khas yang diwariskan untuk generasi mendatang.

Pengembangan ekowisata di luar wilayah taman nasional banyak dikembangkan oleh organisasi masyarakat atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam ekowisata. Mereka ini biasanya memiliki pengetahuan ekowisata, informasi pasar, modal dan potensi wilayah tujuan ekowisata. Mereka kemudian mendapat sambutan positif dari penduduk lokal melalui manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga seluruh stakeholder ekowisata bersama-sama bertanggungjawab memastikan keberlanjutan sumberdaya ekowisata.

IV. Perencanaan Pembangunan Ekowisata

Dalam RPJMN (2015-2019), pengembangan ekowisata terimplementasi dalam pengembangan wisata alam, budaya dan ciptaan, melalui program-program peningkatan konservasi keanekaragaman hayati (Kemenhut dan LH), pengembangan destinasi wisata (Kemenparekraf), serta peningkatan infrastruktur (KemenPU). Kemenhut dan LH mengembangkan kawasan lindung dan Taman Nasional untuk mendukung pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata. Kemenparekraf setiap tahun akan memfasilitasi pengembangan 16 destinasi pariwisata nasional; dan 561 desa wisata melalui program PNPB Mandiri Pariwisata. Kemen PU membangun pelabuhan untuk pengembangan ekowisata bahari dan sungai.²

Kebijakan perencanaan wilayah ekowisata disusun dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Weaver (2002) merumuskan kebijakan dalam hirarki sederhana sebagai berikut:

4.1. Tingkat makro atau nasional.

Sasaran perencanaan tingkat makro adalah terwujudnya landasan kelembagaan nasional yang secara komprehensif memfasilitasi pengembangan ekowisata. Batasan wilayah makro pada dasarnya adalah teritori nasional. Namun pemerintah juga perlu mempertimbangkan perhal isu lingkungan global yang sedang berkembang. Pemerintah meratifikasi kesepakatan global misalnya konvensi Biodiversity, Wetland, atau CITES. Beberapa isu penting kebijakan tingkat makro meliputi:

- i. Pengembangan kelembagaan makro atau nasional (institutional framework) untuk mekanisme koordinasi, dengan lembaga lain di tingkat ekosistem, lokal maupun internasional. Peraturan perundangan³ dikembangkan untuk melandasi beroperasinya taman-taman nasional, perlindungan terhadap suku-suku terasing dan situs warisan. Peraturan berisi substansi batasan, jumlah dan luasan, ruang wilayah, flora fauna yang dikonservasi, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, mekanisme koordinasi dan penyelesaian masalah.
- ii. Penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi perencanaan dan pengelolaan pada tingkat lokal dan ekosistem. Landasan akademik menyajikan keterkaitan antar sistem, manfaat dan distribusinya di tingkat lokal maupun ekosistem. Hasil penelitian digunakan untuk merumuskan peraturan perundangan, dan mekanisme pengelolaan

2. Pembangunan Ekowisata Bahari mencakup pembangunan titik labuh untuk empat jalur pelayaran: (1) Pelabuhan masuk Tarakan-Kalimantan Utara berakhir di Biak-Papua; (2) Pelabuhan masuk Kupang-Nusa Tenggara Timur berakhir di Karimun Jawa-Jawa Tengah; (3) Pelabuhan masuk Saumlaki-Maluku Tenggara berakhir di Bantaeng-Sulawesi Selatan; dan (4) Jalur Laut China Selatan mulai dari Anambas-Batam-Pulau Lingga. Pembangunan Ekowisata Sungai yang mencakup pelabuhan sebagai marina dan dermaga singgah di tempat-tempat objek wisata yaitu: (1) Sungai Kapuas-Kalimantan Barat; (2) Sungai Barito-Kalimantan Tengah; (3) Sungai Mahakam-Kalimantan Timur; (4) Sungai Musi-Sumatera Selatan; dan (5) Sungai Batanghari-Jambi (RPJMN 2015-2019)

3. Peraturan perundangan yang relevan antara lain UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2004; UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang telah diubah dengan PP 3 Tahun 2008; Permenhut No P.22/Minhut-III/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung; Permendagri No 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah; Permenbudpar No Km.18/Hm.001/Mkp/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.

atau pengembangan taman-taman nasional di Indonesia.

- iii. Bantuan teknis dan finansial untuk memotivasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Anggaran diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan SDM, pemasaran atau promosi wisata, pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik dan air bersih. Pemerintah mengambil peran penting dalam rehabilitasi kerusakan lingkungan, penanggulangan kemiskinan di sekitar wilayah ekowisata serta pemberian kompensasi kerugian.

Indonesia memiliki 17 ribu pulau, 470 suku bangsa, 19 daerah hukum adat, dan tidak kurang dari 300 bahasa, serta ragam (warisan) budaya yang tinggi. Hal ini merupakan aset yang dapat dikemas sebagai produk wisata (Ardiwidjaja, 2006). Pemanfaatan wilayah atau konstelasi geografi tersebut akan menghasilkan aktivitas ekonomi dari potensi wisata di seluruh tanah air, memperkuat wawasan kebangsaan dan geopolitik Indonesia (Pokja Wasantara, 2010).

Pembangunan pariwisata memiliki peran signifikan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata berkontribusi dalam devisa, aktivitas ekonomi domestik atau wilayah⁴. Dalam aspek sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya bangsa, dan peningkatan jati diri bangsa. Dalam aspek lingkungan, pariwisata dapat mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional.

Pengembangan sektor pariwisata dan penunjangnya memiliki makna penting dalam integrasi nasional. Berkembangnya desa wisata di daerah berfungsi mengikat geografi wilayah nusantara. Negara seolah hadir memberikan kesejahteraan kepada warga desa. Warga yang sejahtera cenderung bersifat integratif dan menciptakan hubungan positif mendukung eksistensi negara (Pokja Wasantara, 2010).

4.2. Tingkat ekosistem (bioregion).

Sasaran perencanaan wilayah ekosistem adalah batasan wilayah ekosistem dan wilayah fungsional lain, misalnya daerah aliran sungai (DAS), ekosistem (mangrove, pegunungan, lembah), atau untuk kepentingan konservasi habitat dan budaya (Nugroho dan Dahuri, 2012). Wilayah ekosistem dapat mencakup satu atau lebih komunitas lokal, yang memiliki komponen dan interaksi komponen yang sistematis untuk mendukung kesatuan fungsional atau siklus kehidupan. Batasan geografi dapat berupa suatu wilayah konservasi, wilayah khusus atau taman nasional atau secara administrasi ditetapkan secara spesifik. Beberapa isu penting kebijakan tingkat ekosistem meliputi:

- i. Penetapan visi pengembangan ekowisata yang mengadopsi kepentingan lokal. Suatu ekosistem perlu memiliki visi yang dipahami secara sama oleh stakeholder. Visi dapat ditetapkan, misalnya konservasi terumbu karang. Penduduk lokal atau operator berkomitmen mencapai visi tersebut melalui berbagai kegiatan dalam model pengelolaan yang disepakati kedua pihak. Visi tersebut diinformasikan ke semua pihak didukung perangkat peraturan
- ii. Pada tingkat ekosistem, pengembangan wilayah akan berkembang optimal oleh sinergi dari wilayah fungsional lainnya, misalnya pertanian, kehutanan atau perikanan. Interaksi antar sektor secara harmoni menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam wilayah-wilayah tersebut secara keseluruhan.
- iii. Pengembangan wilayah ekowisata yang terintegrasi mencakup jalur penjelajahan (trekking), batas wilayah ekosistem atau DAS untuk kepentingan konservasi habitat dan budaya. Penetapan batas wilayah ekowisata dimaksudkan agar dapat dicegah kebocoran cost atau benefit (externality) yang mengalir kepada yang tidak berhak menerima. Jalur penjelajahan didisain secara hati-hati berdasar kesepakatan stakeholder, dengan memperhatikan titik kritis jalur wisata, dan melindungi situs-situs yang mengalami kepunahan.

Perencanaan tingkat ekosistem diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai leading sector

4. Pada tahun 2015, sektor pariwisata mempekerjakan 10.36 juta orang, menyumbang 9,03 persen tenaga kerja, 4,25 persen PDB. Jumlah wisatawan asing mencapai 10.41 juta orang. Pengeluaran wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara masing-masing 224,7 dan 175,7 triliun rupiah (BPS, 2016). Wisatawan domestik melakukan 264,34 juta perjalanan. Pariwisata menjadi empat besar penyumbang devisa (12,23 miliar dolar) sesudah minyak dan gas, batubara, dan minyak sawit (Statistik Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, <http://www.budpar.go.id>).

telah menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN⁵). Konsep DPN ini setara dengan ekosistem atau wilayah fungsional, dimana telah dipromosikan 15 DPN melalui program Destination Management Organization (DMO), yakni Sabang, Toba, Kota Tua, Pangandaran, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Batur, Rinjani, Flores, Tanjung Puting, Derawan, Toraja, Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat.

DMO merupakan pembentukan dan pengembangan organisasi tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan berbasis proses mulai dari perencanaan hingga operasional dan pemantauan. Program DMO dilaksanakan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang melibatkan masyarakat setempat atau lokal, wisatawan serta stakeholder lain untuk mengembangkan kawasan pariwisata.

4.3. Tingkat lokal.

Sasaran perencanaan tingkat lokal adalah wilayah dan komunitas lokal. Pengertian komunitas lokal meliputi penduduk perseorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama perihal ekowisata. Batasannya adalah aktivitas penduduk lokal dan kegiatan ekonomi. Batasan geografi dapat berupa di dalam wilayah yang diijinkan oleh pengelola taman nasional, wilayah administrasi atau tradisi, desa atau desa adat, atau adat setempat. Beberapa isu penting kebijakan tingkat lokal meliputi:

- i. Identifikasi komunitas lokal dan partisipasi. Tahapan ini sangat penting untuk penetapan batasan stakeholder penduduk dan sejauh mana partisipasi dan implikasi perolehan kesejahteraan. Nilai-nilai lokal perlu diapresiasi sebagai bahan pengalaman yang masuk dalam pengembangan jasa ekowisata.
- ii. Mendorong dan memberdayakan ekonomi lokal untuk menciptakan multiplier effect. Partisipasi dan peran penduduk lokal adalah sasaran utama dalam pengembangan ekonomi jasa ekowisata. Makin tinggi peran tersebut, semakin banyaknya share lokal dan insentif dalam konservasi lingkungan.
- iii. Mengembangkan ruang dan wilayah tujuan ekowisata. Batasan kegiatan dan karakteristik usaha, lokasi, serta lingkungan jalur perjalanan/petualangan adalah bagian penting perencanaan pengelolaan. Spesifikasi ruang atau lokasi ini menjadi motivasi bagi operator dalam penyediaan dan keunikan jasa ekowisata.
- iv. Mengembangkan produk dan jasa-jasa ekowisata yang mendukung konservasi. Penduduk lokal perlu dilatih perihal entrepreneurship, berkreasi dan berinovasi. Kreativitas akan mengurangi ketergantungan pada bahan mentah sumberdaya alam dan melahirkan nilai tambah yang tinggi. Hal ini akan memberi insentif bagi upaya-upaya konservasi lingkungan.

Perencanaan tingkat lokal berhubungan dengan pengembangan potensi, pemberdayaan dan manajemen ekowisata di desa. Potensi desa berasal dari kehidupan sosial budaya, alam lingkungan dan aktivitas ekonomi, dapat menjadi daya tarik wisata desa. Kehidupan sosial budaya desa dengan ragam keadaan papan (rumah dan pemukiman), sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), seni, tradisi, nilai/norma dan dinamika kehidupannya, dapat diangkat untuk memberi nilai tambah wisata.

Potensi alam berupa pegunungan, pantai, danau, laut, lembah, sungai, dapat dimanfaatkan untuk penjelajahan, olahraga, atau petualangan. Potensi ekonomi seperti agribisnis (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan), home industri, atau sektor penunjang lain di desa, menjadi nilai tambah wisata. Semua potensi itu dapat bergerak menjadi aktivitas ekonomi didorong oleh faktor yang kompleks, permintaan-penawaran, pengaruh eksternal-internal, kreasi-inovasi, kepemimpinan dan organisasi, serta dinamika kehidupan desa. Implementasi kluster wisata berangkat dari kondisi ini, disesuaikan kondisi desa (Nugroho dan Negara, 2015).

Di tingkat lokal bertemu kepentingan penduduk lokal, operator, wisatawan, aparat pemda, atau petugas Taman Nasional. Ketidakmampuan berkomunikasi atau berkoordinasi, atau perbedaan pemahaman perihal ekowisata, batasan wewenang, hak dan kewajiban, sering menimbulkan permasalahan atau konflik. Hal ini dapat mengancam konservasi dan keberlanjutan pengelolaan jasa ekowisata.

5. Indonesia memiliki (i) 50 DPN yang tersebar di 33 provinsi; dan (ii) 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang tersebar di 50 DPN. DPN (Destinasi Pariwisata Nasional) adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (PP 50 tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025)

Daftar Pustaka

- Ardiwidjaja, R. 2006. Pariwisata Budaya, Mengapa Tidak Sekarang?, www.budpar.go.id/filedata/747_88-pariwisatabudaya.pdf [Agustus 2009]
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2016. Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) Tahun 2016. BPS Pusat, Jakarta.
- Coles, T. 2006. Suggestions For Developing Tourism in The Wakatobi Islands. Operation Wallacea Trust Project.
- Kumar, R , S. S. Gill dan P. Kunasekaran 2012. Tourism as a Poverty Eradication Tool for Rural Areas in Selangor, Malaysia. *Global Journal of Human Social Science*. 12(7): 21-26
- Liu, A. 2006. Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia. *Tourism Management* 27 (2006): 878-889
- Nugroho, I. 2010. Pengembangan Ekowisata dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Edisi 01 tahun 2010. 65-76.
- Nugroho, I. 2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta. 362p.
- Nugroho, I. dan P. D. Negara. 2015. Pengembangan Desa Melalui Ekowisata. *Era Adicitra Intermedia*, Solo. 281p
- Nugroho, I. dan R. Dahuri. 2012. Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. *LP3ES*, Jakarta. Cetakan Ulang. 500p.
- Parks T, H., T. A. Parks and C. Allen. 2009. The Development of a Framework for Studying Ecotourism. *International Journal of Management*. 26(1): 89-97
- Pokja Wasantara. 2010. Konsepsi Wawasan Nusantara. Pokja Wasantara. Lemhannas, Jakarta
- Purnomowati, W., I. Nugroho dan P. D. Negara. 2012. Entrepreneurship Ability On Ecotourism Services Of Local People In Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Malang Regency, East Java, Indonesia. 11th International Entrepreneurship Forum (IEF) Conference Entrepreneurship and Sustainability. Kuala Lumpur, Malaysia. 3-6 September 2012. Conference Proceeding. Volume 2, 458-473.
- Rothberg, D. 1999. Enhanced and Alternative Financing Mechanisms Strengthening National Park Management in Indonesia. NRMP USAID, Jakarta
- RPJMN 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Perpres No 2 Tahun 2015. Bappenas, Jakarta
- Saraithong, W and K. Chanchaoenchai. 2011. Tourists' behaviour in Thai homestay business. *International Journal of Management Cases*. Special Issue. (15): 112-126.
- USAID Indonesia. 2004. Report on Biodiversity and Tropical Forests in Indonesia Submitted in accordance with Foreign Assistance Act Sections 118/119
- Weaver, D. 2002. Ecotourism as a Tool for Development in Peripheral Regions. Presented for The 4th International Environmental Congress of Andorra: 'Ecotourism in Mountain Areas, July 17, 2002.